

#### KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Jakarta Selatan Telp. (021) 5221618/ Fax. (021) 5265480

Nomor : PPE.PP.04.03-2845 28 Desember 2022

Lampiran : 1 (satu) dokumen

Hal : Penyampaian Pembagian Wilayah

Kerja (Zonasi) Tahun 2023

Yth. Kepala Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat

di

Tempat

Sehubungan dengan usulan pembagian wilayah kerja (zonasi) Perancang Peraturan Perundang-undangan Tahun 2023 dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat, bersama ini kami sampaikan Keputusan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan tentang Pembagian Wilayah Kerja (Zonasi) Perancang Peraturan Perundang-undangan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 yang penetapannya berdasarkan:

- a. pembagian wilayah kerja (zonasi) Perancang Peraturan Perundang-undangan disesuaikan dengan jumlah wilayah kerja pada masing-masing Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan dilakukan perputaran dengan mempertimbangkan usulan pembagian wilayah kerja (zonasi) dan Keputusan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan tentang Pembagian Wilayah Kerja (Zonasi) Perancang Peraturan Perundang-undangan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020 dan Tahun 2021; dan
- b. Perancang Peraturan Perundang-undangan melaksanakan tugas pada wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang agar pelaksanaan tugas pembentukan peraturan perundang-undangan di provinsi atau kabupaten/kota terlaksana secara optimal dan proporsional.

Demikian, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Plt. Direktur Jenderal

Peraturan Peraturan Perundang-undangan,

Dr. Dhahana Putra

NIP 19690909 199303 1 001



# KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

# KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NOMOR PPE.2755.PP.04.03 TAHUN 2022

#### TENTANG

PEMBAGIAN WILAYAH KERJA (ZONASI)
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DI KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NUSA TENGGARA BARAT

#### DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,

**TAHUN 2023** 

### Menimbang

- a. bahwa untuk mewujudkan pembentukan Peraturan
  Perundang-undangan di daerah yang berkualitas, perlu
  mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundangundangan dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan
  Perundang-undangan di daerah;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pembentukan Peraturan Perundang-undangan di daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan secara proporsional sesuai dengan jenjang ahli, perlu dilakukan perputaran atau rotasi pembagian wilayah kerja (zonasi) Perancang Peraturan Perundang-undangan setiap 1 (satu) tahun sekali;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi Perancang
  Peraturan Perundang-undangan dalam melakukan tugas
  Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di daerah,
  perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Peraturan

Perundang-undangan tentang Pembagian Wilayah Kerja (Zonasi) Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Peraturan Perundangundangan tentang Pembagian Wilayah Kerja (Zonasi) Perancang Peraturan Perundang-undangan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat Tahun 2023;

#### Mengingat

:

- 12 1. Undang-Undang Nomor Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
- 3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundangundangan yang Dibentuk di Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1133 Tahun 2018);
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
   Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor

Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441);

 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PEMBAGIAN WILAYAH KERJA (ZONASI) PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2023.

**KESATU** 

Membagi wilayah kerja (zonasi) Perancang Peraturan Perundangundangan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Tugas Perancang Peraturan Perundang-undangan adalah melakukan:

- 1. pembentukan Peraturan Perundang-undangan di daerah;
- 2. penyusunan instrumen hukum lainnya;
- 3. pemetaan Peraturan Daerah; dan
- 4. mediasi dan konsultasi.

KETIGA

Dalam hal terdapat beban kinerja tinggi pada suatu wilayah kerja (zonasi), Perancang Peraturan Perundang-undangan di luar wilayah kerja (zonasi) dapat melaksanakan tugas di luar wilayah kerja (zonasi) yang telah ditetapkan dalam Keputusan ini berdasarkan surat perintah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan menyampaikan surat perintah tersebut kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

KEEMPAT : Kegiatan yang dilakukan oleh Perancang Peraturan Perundang-

undangan di luar wilayah kerja (zonasi) tetap dapat diperhitungkan

sebagai hasil kerja.

KELIMA : Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini

dipandang mampu melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam diktum KEDUA.

KEENAM : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini

dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kantor

Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa

Tenggara Barat.

KETUJUH : Keputusan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan ini

berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari

sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 Desember 2022

Plt. DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,

Dr. DHAHANA PUTRA

NIP. 19690909 199303 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 3. Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat; dan
- 5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : PPE.2755.PP.04.03 TAHUN 2022

Tanggal : 22 Desember 2022

# PEMBAGIAN WILAYAH KERJA (ZONASI) PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HIKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

## KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2023

No	Nama	Wilayah Kerja	Jenjang
1.	Suyanto Edi Wibowo	Provinsi Nusa	1) Ahli Madya (Suyanto Edi Wibowo)
		Tenggara Barat	2) Ahli Muda (Jupriadi Putra)
			3) Ahli Muda (Taufan Arisandy)
			4) Ahli Muda (Ni Ketut Citrawati)
			5) Ahli Muda (Zelis Febriani)
			6) Ahli Pertama (Hermi Sari BN)
		Kota Mataram	1) Ahli Madya (Suyanto Edi Wibowo)
			2) Ahli Muda (Ni Ketut Citrawati)
			3) Ahli Muda (Pahittiartik)
			4) Ahli Pertama (Fathin Rodada)
			5) Ahli Pertama (Riki Aditya)
		Kabupaten Lombok	1) Ahli Madya (Suyanto Edi Wibowo)
		Barat	2) Ahli Muda (Pahittiartik)
			3) Ahli Muda (Khairuddin)
			4) Ahli Muda (Baiq Rara Charina)
			5) Ahli Pertama (Nyoman Daivi Prakitri
			Utami)
		Kabupaten Sumbawa	1) Ahli Madya (Suyanto Edi Wibowo)
		Barat	2) Ahli Muda (Pahittiartik)
			3) Ahli Muda (Baiq Rara Charina)
			4) Ahli Pertama (Rio Dwi Nugroho)
			5) Ahli Pertama (Nyoman Daivi Prakitri
			Utami)
		Kabupaten Sumbawa	1) Ahli Madya (Suyanto Edi Wibowo)
			2) Ahli Muda (Taufan Arisandy)
			3) Ahli Muda (Khairuddin)
			4) Ahli Muda (Baiq Rara Charina)
			5) Ahli Pertama (Riki Aditya)
			6) Ahli Pertama (Hermi Sari BN)
		Kabupaten Bima	1) Ahli Madya (Suyanto Edi Wibowo)
			2) Ahli Muda (Taufan Arisandy
			3) Ahli Muda (Ni Ketut Citrawati)
			4) Ahli Muda (Zelis Febriani)
	1.1.5	D	5) Ahli Pertama (Riki Aditya)
2.	Jupriadi Putra	Provinsi Nusa	1) Ahli Madya (Suyanto Edi Wibowo)
		Tenggara Barat	2) Ahli Muda (Jupriadi Putra)
			3) Ahli Muda (Taufan Arisandy)
			4) Ahli Muda (Ni Ketut Citrawati)
			5) Ahli Muda (Zelis Febriani)
		IZ-languation I at 1	6) Ahli Pertama (Hermi Sari BN)
		Kabupaten Lombok	1) Ahli Muda (Jupriadi Putra)
		Utara	2) Ahli Muda (Zelis Febriani)
			3) Ahli Muda (Khairuddin)
			4) Ahli Muda (Sitti Afina Desi Suryantini)
			5) Ahli Pertama (Fathin Rodada)
		Walanatan Danier	6) Ahli Pertama (Ahmad Muzayyin)
		Kabupaten Dompu	1) Ahli Muda (Jupriadi Putra)
			2) Ahli Muda (Ni Ketut Citrawati)

			3) Ahli Muda (Sitti Afina Desi Suryantini)
			4) Ahli Pertama (Fathin Rodada)
			5) Ahli Pertama (Rio Dwi Nugroho)
			6) Ahli Pertama (Ahmad Muzayyin)
		Kota Bima	1) Ahli Muda (Jupriadi Putra)
			2) Ahli Muda (Pahittiartik
			3) Ahli Muda (Sitti Afina Desi Suryantini)
			4) Ahli Pertama (Rio Dwi Nugroho)
			5) Ahli Pertama (Prayogi Simatupang)
			6) Ahli Pertama (Muhammad
			Fitrahurrahman Gaffar)
<del>3.</del>	Taufan Arisandy	Provinsi Nusa	1) Ahli Madya (Suyanto Edi Wibowo)
		Tenggara Barat	2) Ahli Muda (Jupriadi Putra)
			3) Ahli Muda (Taufan Arisandy)
			4) Ahli Muda (Ni Ketut Citrawati)
			5) Ahli Muda (Zelis Febriani)
			6) Ahli Pertama (Hermi Sari BN)
		Kabupaten Lombok	1) Ahli Muda (Taufan Arisandy)
		Timur	2) Ahli Muda (Khairuddin)
			3) Ahli Muda (Baiq Rara Charina)
			4) Ahli Pertama (Nyoman Daivi Prakitri
			Utami)
			5) Ahli Pertama (Prayogi Simatupang)
			6) Ahli Pertama (Muhammad
		IZ 1	Fitrahurrahman Gaffar)
		Kabupaten Sumbawa	1) Ahli Madya (Suyanto Edi Wibowo)
			2) Ahli Muda (Taufan Arisandy)
			3) Ahli Muda (Khairuddin)
			4) Ahli Muda (Baiq Rara Charina)
			5) Ahli Pertama (Hermi Sari BN)
		W.1. Bi	6) Ahli Pertama (Riki Aditya)
		Kabupaten Bima	1) Ahli Madya (Suyanto Edi Wibowo) 2) Ahli Muda (Taufan Arisandy
			3) Ahli Muda (Ni Ketut Citrawati)
			4) Ahli Muda (Zelis Febriani)
			5) Ahli Pertama (Riki Aditya)
4.	Ni Ketut Citrawati	Provinsi Nusa	1) Ahli Madya (Suyanto Edi Wibowo)
١.	W Retat Citiawan	Tenggara Barat	2) Ahli Muda (Jupriadi Putra)
		Tenggara Barat	3) Ahli Muda (Taufan Arisandy)
			4) Ahli Muda (Ni Ketut Citrawati)
			5) Ahli Muda (Zelis Febriani)
			6) Ahli Pertama (Hermi Sari BN)
		Kota Mataram	1) Ahli Madya (Suyanto Edi Wibowo)
			2) Ahli Muda (Ni Ketut Citrawati)
			3) Ahli Muda (Pahittiartik)
			4) Ahli Pertama (Fathin Rodada)
			5) Ahli Pertama (Riki Aditya)
		Kabupaten Dompu	1) Ahli Muda (Jupriadi Putra)
			2) Ahli Muda (Ni Ketut Citrawati)
			3) Ahli Muda (Sitti Afina Desi Suryantini)
			4) Ahli Pertama (Fathin Rodada)
			5) Ahli Pertama (Rio Dwi Nugroho)
			6) Ahli Pertama (Ahmad Muzayyin)
		Kabupaten Bima	1) Ahli Madya (Suyanto Edi Wibowo)
			2) Ahli Muda (Taufan Arisandy
			3) Ahli Muda (Ni Ketut Citrawati)
			4) Ahli Muda (Zelis Febriani)
			5) Ahli Pertama (Riki Aditya)
5.	Zelis Febriani	Provinsi Nusa	1) Ahli Madya (Suyanto Edi Wibowo)
			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
٥.		Tenggara Barat	2) Ahli Muda (Jupriadi Putra)

4) Ahli Pertama (Hermi Sa 5) Ahli Muda (Ni Ketut Ci 6) Ahli Muda (Zelis Febria Kabupaten Lombok Tengah 2) Ahli Muda (Sitti Afina I 3) Ahli Pertama (Hermi Sa	trawati) ani)
Kabupaten Lombok 1) Ahli Muda (Zelis Febria Tengah 2) Ahli Muda (Sitti Afina I	ani)
Kabupaten Lombok 1) Ahli Muda (Zelis Febria Tengah 2) Ahli Muda (Sitti Afina I	
Tengah 2) Ahli Muda (Sitti Afina I	nni)
	,
	,
	•
4) Ahli Pertama (Ahmad M	,
5) Ahli Pertama (Prayogi S	,
6) Ahli Pertama (Muhamn	nad
Fitrahurrahman Gaffar	<b>c</b> )
Kabupaten Lombok 1) Ahli Muda (Jupriadi Pu	
Utara 2) Ahli Muda (Zelis Febria	ani)
3) Ahli Muda (Khairuddin	ı)
4) Ahli Muda (Sitti Afina I	Desi Suryantini)
5) Ahli Pertama (Fathin R	odada)
6) Ahli Pertama (Ahmad M	Muzayyin)
Kabupaten Bima 1) Ahli Madya (Suyanto E	di Wibowo)
2) Ahli Muda (Taufan Aris	sandy
3) Ahli Muda (Ni Ketut Ci	•
4) Ahli Muda (Zelis Febria	,
5) Ahli Pertama (Riki Adit	
6. Pahittiartik Kabupaten Lombok 1) Ahli Madya (Suyanto E	
Barat 2) Ahli Muda (Pahittiartik	,
3) Ahli Muda (Khairuddin	,
4) Ahli Muda (Baiq Rara C	,
5) Ahli Pertama (Nyoman	•
Utami)	Darvi i ramari
Kota Mataram 1) Ahli Madya (Suyanto E	di Wibowo)
2) Ahli Muda (Ni Ketut Ci	,
3) Ahli Muda (Pahittiartik	
4) Ahli Pertama (Fathin R	,
5) Ahli Pertama (Riki Adit	,
Kabupaten Sumbawa 1) Ahli Madya (Suyanto E	· /
Barat 2) Ahli Muda (Pahittiartik	,
3) Ahli Muda (Baiq Rara C	
4) Ahli Pertama (Rio Dwi I	
5) Ahli Pertama (Nyoman	
Utami)	Daivi Flakitii
Kota Bima 1) Ahli Muda (Jupriadi Pu	1tro)
2) Ahli Muda (Pahittiartik	,
3) Ahli Muda (Sitti Afina I	
4) Ahli Pertama (Rio Dwi I	,
5) Ahli Pertama (Prayogi S	O ,
	<b>1</b> O,
6) Ahli Pertama (Muhamn	
Fitrahurrahman Gaffar	,
7. Khairuddin Kabupaten Lombok 1) Ahli Madya (Suyanto E	,
Barat 2) Ahli Muda (Pahittiartik	•
3) Ahli Muda (Khairuddin	,
4) Ahli Muda (Baiq Rara (	•
5) Ahli Pertama (Nyoman	Daivi Prakitri
Utami)	1: 117:1.
Kabupaten Sumbawa 1) Ahli Madya (Suyanto E	
2) Ahli Muda (Taufan Aris	- ,
3) Ahli Muda (Khairuddin	
4) Ahli Muda (Baiq Rara (	
5) Ahli Pertama (Hermi Sa	
6) Ahli Pertama (Riki Adit	
Kabupaten Lombok 1) Ahli Muda (Jupriadi Pu	,
Utara 2) Ahli Muda (Zelis Febria	,
3) Ahli Muda (Khairuddin	
4) Ahli Muda (Sitti Afina I	Desi Suryantini)

			5)	Ahli Pertama (Fathin Rodada)
			6)	Ahli Pertama (Ahmad Muzayyin)
		Kabupaten Lombok	1)	Ahli Muda (Taufan Arisandy)
		Timur	2)	Ahli Muda (Khairuddin)
			3)	Ahli Muda (Baiq Rara Charina)
			4)	Ahli Pertama (Nyoman Daivi Prakitri
			ĺ	Utami)
			5)	Ahli Pertama (Prayogi Simatupang)
			,	Ahli Pertama (Muhammad
			,	Fitrahurrahman Gaffar)
8.	Sitti Afina Desi Suryantini	Kabupaten Lombok	1)	Ahli Muda (Zelis Febriani)
0.	Sitti i i i i i i i i i i i i i i i i i	Tengah	2)	Ahli Muda (Sitti Afina Desi Suryantini)
		Teligali	3)	Ahli Pertama (Hermi Sari BN)
			4)	Ahli Pertama (Ahmad Muzayyin)
			,	` ""
			5)	Ahli Pertama (Prayogi Simatupang)
			6)	Ahli Pertama (Muhammad
		77.1	4.	Fitrahurrahman Gaffar)
		Kabupaten Dompu	1)	Ahli Muda (Jupriadi Putra)
			2)	Ahli Muda (Ni Ketut Citrawati)
			3)	Ahli Muda (Sitti Afina Desi Suryantini)
			4)	Ahli Pertama (Fathin Rodada)
			5)	Ahli Pertama (Rio Dwi Nugroho)
			6)	Ahli Pertama (Ahmad Muzayyin)
		Kota Bima	1)	Ahli Muda (Jupriadi Putra)
			2)	Ahli Muda (Pahittiartik)
			3)	Ahli Muda (Sitti Afina Desi Suryantini)
			4)	Ahli Pertama (Rio Dwi Nugroho)
			5)	Ahli Pertama (Prayogi Simatupang)
			6)	Ahli Pertama (Muhammad
			,	Fitrahurrahman Gaffar)
		Kabupaten Lombok	1)	Ahli Muda (Jupriadi Putra)
		Utara	2)	Ahli Muda (Zelis Febriani)
		Otara	,	Ahli Muda (Khairuddin)
				Ahli Muda (Sitti Afina Desi Suryantini)
				,
			5)	Ahli Pertama (Fathin Rodada)
	Deita Danie Olassias Gi	TZ - 1	6)	Ahli Pertama (Ahmad Muzayyin)
9.	Baiq Rara Charina Sizi	Kabupaten Lombok	1)	Ahli Madya (Suyanto Edi Wibowo)
		Barat	2)	Ahli Muda (Pahittiartik)
			3)	Ahli Muda (Khairuddin)
			4)	Ahli Muda (Baiq Rara Charina)
			5)	Ahli Pertama (Nyoman Daivi Prakitri
				Utami)
		Kabupaten Sumbawa	1)	Ahli Madya (Suyanto Edi Wibowo)
		Barat	$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$	Ahli Muda (Pahittiartik)
			3)	Ahli Muda (Faintuaruk) Ahli Muda (Baiq Rara Charina)
			4)	
			,	Ahli Pertama (Rio Dwi Nugroho)
			5)	Ahli Pertama (Nyoman Daivi Prakitri
		TZ -1	4 \	Utami)
		Kabupaten Lombok	1)	Ahli Muda (Taufan Arisandy)
		Timur	2)	Ahli Muda (Khairuddin)
			3)	Ahli Muda (Baiq Rara Charina)
			4)	Ahli Pertama (Nyoman Daivi Prakitri
ĺ				Utami)
ĺ			5)	Ahli Pertama (Prayogi Simatupang)
ĺ			6)	Ahli Pertama (Muhammad
				Fitrahurrahman Gaffar)
		Kabupaten Sumbawa	1)	Ahli Madya (Suyanto Edi Wibowo)
			2)	Ahli Muda (Taufan Arisandy)
			3)	Ahli Muda (Khairuddin)
			4)	Ahli Muda (Baiq Rara Charina)
			5)	Ahli Pertama (Hermi Sari BN)
<u> </u>	<u> </u>		J	min i citania (ricinii Sali Div)

F				A111 D (D)11 A111
10		<del>                                     </del>	6)	Ahli Pertama (Riki Aditya)
10.	Hermi Sari BN	Provinsi Nusa	1)	Ahli Madya (Suyanto Edi Wibowo)
		Tenggara Barat	2)	Ahli Muda (Jupriadi Putra)
			3)	Ahli Muda (Taufan Arisandy)
			4)	Ahli Muda (Ni Ketut Citrawati)
			5)	Ahli Muda (Zelis Febriani)
			6)	Ahli Pertama (Hermi Sari BN)
		Kabupaten Lombok	1)	Ahli Muda (Zelis Febriani)
		Tengah	2)	Ahli Muda (Sitti Afina Desi Suryantini)
		10118011	3)	Ahli Pertama (Hermi Sari BN)
			4)	,
			5)	,
			6)	(
			,	Fitrahurrahman Gaffar)
		Kabupaten	1)	Ahli Madya (Suyanto Edi Wibowo)
			2)	Ahli Muda (Taufan Arisandy)
		Sumbawa	,	`
			3)	Ahli Muda (Khairuddin)
			4)	\ <u>1</u> ,
			5)	Ahli Pertama (Hermi Sari BN)
		1	6)	Ahli Pertama (Riki Aditya)
11.	Fathin Rodada	Kota Mataram	1)	Ahli Madya (Suyanto Edi Wibowo)
			2)	Ahli Muda (Ni Ketut Citrawati)
			3)	Ahli Muda (Pahittiartik)
			4)	Ahli Pertama (Fathin Rodada)
			5)	Ahli Pertama (Riki Aditya)
		Kabupaten Dompu	1)	Ahli Muda (Jupriadi Putra)
			2)	Ahli Muda (Ni Ketut Citrawati)
			3)	Ahli Muda (Sitti Afina Desi Suryantini)
			4)	Ahli Pertama (Fathin Rodada)
			5)	,
			6)	Ahli Pertama (Ahmad Muzayyin)
		Kabupaten Lombok	1)	Ahli Muda (Jupriadi Putra)
		Utara	2)	Ahli Muda (Zelis Febriani)
		Otara	,	,
				Ahli Muda (Khairuddin)
			4)	,
			5)	,
			6)	Ahli Pertama (Ahmad Muzayyin)
12.	Riki Aditya	Kabupaten Sumbawa	1)	Ahli Madya (Suyanto Edi Wibowo)
			2)	Ahli Muda (Taufan Arisandy)
			3)	Ahli Muda (Khairuddin)
			4)	Ahli Muda (Baiq Rara Charina)
			5)	Ahli Pertama (Hermi Sari BN)
			6)	Ahli Pertama (Riki Aditya)
		Kota Mataram	1)	Ahli Madya (Suyanto Edi Wibowo)
			2)	Ahli Muda (Ni Ketut Citrawati)
			3)	Ahli Muda (Pahittiartik)
			4)	Ahli Pertama (Fathin Rodada)
			5)	Ahli Pertama (Riki Aditya)
		Kabupaten Bima	1)	Ahli Madya (Suyanto Edi Wibowo)
		Tasapaten bina	2)	Ahli Muda (Taufan Arisandy
			3)	Ahli Muda (Ni Ketut Citrawati)
			4)	Ahli Muda (Zelis Febriani)
1.0	Di. D. M. 1	IZ-1 D	5)	Ahli Pertama (Riki Aditya)
13.	Rio Dwi Nugroho	Kabupaten Dompu	1)	Ahli Muda (Jupriadi Putra)
			2)	Ahli Muda (Ni Ketut Citrawati)
			3)	Ahli Muda (Sitti Afina Desi Suryantini)
			4)	Ahli Pertama (Fathin Rodada)
			5)	Ahli Pertama (Rio Dwi Nugroho)
			6)	Ahli Pertama (Ahmad Muzayyin)
		Kabupaten Sumbawa	1)	Ahli Madya (Suyanto Edi Wibowo)
		Barat	2)	Ahli Muda (Pahittiartik)
	I .		,	

			3)	Ahli Muda (Baiq Rara Charina)
			4)	Ahli Pertama (Rio Dwi Nugroho)
			5)	Ahli Pertama (Nyoman Daivi Prakitri
		T + D'	1)	Utami)
		Kota Bima	1)	Ahli Muda (Jupriadi Putra)
			2)	Ahli Muda (Pahittiartik)
			3)	Ahli Muda (Sitti Afina Desi Suryantini)
			4)	Ahli Pertama (Rio Dwi Nugroho)
			5)	Ahli Pertama (Prayogi Simatupang)
			6)	Ahli Pertama (Muhammad Fitrahurrahman Gaffar)
14.	Nyoman Daivi Prakitri	Kabupaten Lombok	1)	Ahli Madya (Suyanto Edi Wibowo)
14.	Utami	Barat	2)	Ahli Muda (Pahittiartik)
	Otaliii	Barat	3)	Ahli Muda (Khairuddin)
			4)	Ahli Muda (Baiq Rara Charina)
			5)	Ahli Pertama (Nyoman Daivi Prakitri
			0)	Utami)
		Kabupaten Sumbawa	1)	Ahli Madya (Suyanto Edi Wibowo)
		Barat	2)	Ahli Muda (Pahittiartik)
			3)	Ahli Muda (Baiq Rara Charina)
			4)	Ahli Pertama (Rio Dwi Nugroho)
			5)	Ahli Pertama (Nyoman Daivi Prakitri
			,	Utami)
		Kabupaten Lombok	1)	Ahli Muda (Taufan Arisandy)
		Timur	2)	Ahli Muda (Khairuddin)
			3)	Ahli Muda (Baiq Rara Charina)
			4)	Ahli Pertama (Nyoman Daivi Prakitri
				Utami)
				Ahli Pertama (Prayogi Simatupang)
			6)	Ahli Pertama (Muhammad
				Fitrahurrahman Gaffar)
15.	Ahmad Muzayyin	Kabupaten Lombok	1)	Ahli Muda (Zelis Febriani)
		Tengah	2)	Ahli Muda (Sitti Afina Desi Suryantini)
				Ahli Pertama (Hermi Sari BN)
			4)	Ahli Pertama (Ahmad Muzayyin)
			5) 6)	Ahli Pertama (Prayogi Simatupang) Ahli Pertama (Muhammad
			0)	Fitrahurrahman Gaffar)
		Kabupaten Dompu	1)	Ahli Muda (Jupriadi Putra)
		Rasapaten Bompa	2)	Ahli Muda (Ni Ketut Citrawati)
			3)	Ahli Muda (Sitti Afina Desi Suryantini)
			4)	Ahli Pertama (Fathin Rodada)
			5)	Ahli Pertama (Rio Dwi Nugroho)
			6)	Ahli Pertama (Ahmad Muzayyin)
		Kabupaten Lombok	1)	Ahli Muda (Jupriadi Putra)
		Utara	2)	Ahli Muda (Zelis Febriani)
			3)	Ahli Muda (Khairuddin)
			4)	Ahli Muda (Sitti Afina Desi Suryantini)
			5)	Ahli Pertama (Fathin Rodada)
			6)	Ahli Pertama (Ahmad Muzayyin)
16.	Prayogi Simatupang	Kabupaten Lombok	1)	Ahli Muda (Zelis Febriani)
		Tengah	2)	Ahli Muda (Sitti Afina Desi Suryantini)
			3)	Ahli Pertama (Hermi Sari BN)
			4)	Ahli Pertama (Ahmad Muzayyin)
			5)	Ahli Pertama (Prayogi Simatupang)
			6)	Ahli Pertama (Muhammad
		IZ / D'	4 \	Fitrahurrahman Gaffar)
		Kota Bima	1)	Ahli Muda (Jupriadi Putra)
			2)	Ahli Muda (Pahittiartik)
			3)	Ahli Muda (Sitti Afina Desi Suryantini)
			4)	Ahli Pertama (Rio Dwi Nugroho)

			5) Ahli Pertama (Prayogi Simatupang)
			6) Ahli Pertama (Muhammad
			Fitrahurrahman Gaffar)
		Kabupaten Lombok	1) Ahli Muda (Taufan Arisandy)
		Timur	2) Ahli Muda (Khairuddin)
			3) Ahli Muda (Baiq Rara Charina)
			4) Ahli Pertama (Nyoman Daivi Prakitri
			Utami)
			5) Ahli Pertama (Prayogi Simatupang)
			6) Ahli Pertama (Muhammad
			Fitrahurrahman Gaffar)
17.	Muhammad	Kabupaten Lombok	1) Ahli Muda (Zelis Febriani)
	Fitrahurrahman Gaffar	Tengah	2) Ahli Muda (Sitti Afina Desi Suryantini)
			3) Ahli Pertama (Hermi Sari BN)
			4) Ahli Pertama (Ahmad Muzayyin)
			5) Ahli Pertama (Prayogi Simatupang)
			6) Ahli Pertama (Muhammad
			Fitrahurrahman Gaffar)
		Kota Bima	1) Ahli Muda (Jupriadi Putra)
			2) Ahli Muda (Pahittiartik)
			3) Ahli Muda (Sitti Afina Desi Suryantini)
			4) Ahli Pertama (Rio Dwi Nugroho)
			5) Ahli Pertama (Prayogi Simatupang)
			6) Ahli Pertama (Muhammad
			Fitrahurrahman Gaffar)
		Kabupaten Lombok	1) Ahli Muda (Taufan Arisandy)
		Timur	2) Ahli Muda (Khairuddin)
			3) Ahli Muda (Baiq Rara Charina)
			4) Ahli Pertama (Nyoman Daivi Prakitri
			Utami)
			5) Ahli Pertama (Prayogi Simatupang)
			6) Ahli Pertama (Muhammad
			Fitrahurrahman Gaffar)

Plt. DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,

Dr. Dhahana Putra

NIP. 196909091993031001